



INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2019

I. PENDAHULUAN

Masyarakat Kabupaten Tana Toraja yang Kami hormati, Kami cintai dan Kami banggakan, perkenankan kami pada kesempatan yang berbahagia ini, dengan segala kerendahan hati terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD) Tahun Anggaran 2019 dapat diselesaikan dan di informasikan kepada masyarakat.

Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tersebut dilaksanakan dalam bentuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kepada Masyarakat sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD, LKPJ dan ILPPD. Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut, Pemerintahan Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun melalui media ini menyampaikan ILPPD Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2019 untuk diketahui seluruh warga masyarakat Kabupaten Tana Toraja.

A. GAMBARAN UMUM DAERAH

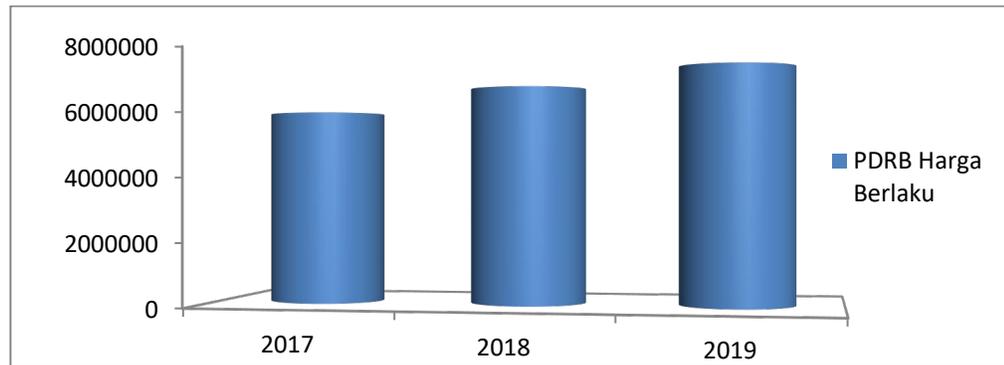
Kabupaten Tana Toraja dengan luas wilayah 2.054,30 Km², secara geografis terletak antara 2^o 0' - 3^o 0' Lintang Selatan (LS) dan antara 119^o 0' dan 120^o 0' Bujur Timur (BT) dengan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten Toraja Utara, disebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Pinrang, disebelah Timur dengan Kabupaten Luwu, di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat. Secara administrasi wilayah Kabupaten Tana Toraja terdiri dari 19 Kecamatan, 47 Kelurahan dan 112 Lembang. Berdasarkan hasil registrasi penduduk pada akhir tahun 2019 jumlah penduduk Tana Toraja sebanyak 286.562 jiwa dengan komposisi jumlah penduduk menurut jenis kelamin laki – laki sebanyak 148.501 jiwa (51,82%) dan perempuan sebanyak 138.061 jiwa (48,18%).

B. PERTUMBUHAN EKONOMI / PDRB

Kondisi Ekonomi Kabupaten Tana Toraja pada Tahun 2019 sebagai berikut :

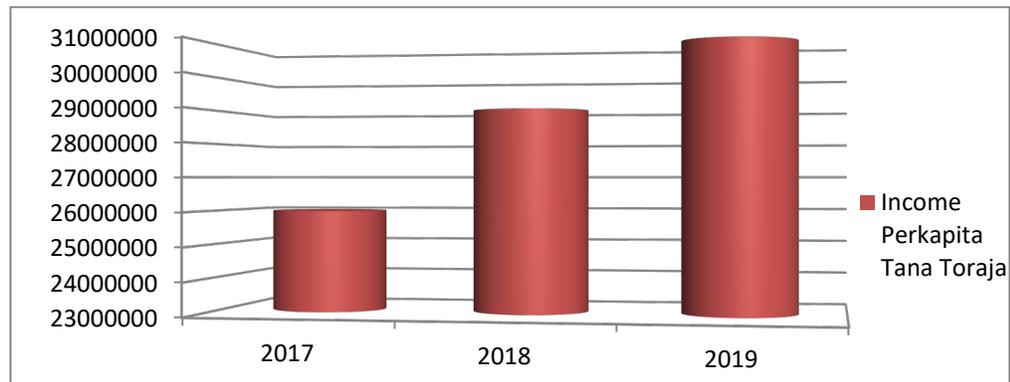
1. Berdasarkan perhitungan BPS bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tana Toraja atas dasar harga berlaku dalam kurun 3(tiga) tahun yaitu pada tahun 2017 sebesar Rp.6.054.907,73 juta, tahun 2018 sebesar Rp.6.824.872,59 juta sedangkan tahun 2019 sebesar Rp. 7.479.773,62 juta rupiah.

GRAFIK PDRB



2. Adapun PDRB perkapita (ADHB) Kabupaten Tana Toraja cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya selama kurun waktu 3(tiga) tahun yaitu pada tahun 2017 sebesar 26,15juta rupiah, pada tahun 2018 sebesar 29,31 juta rupiah, sedangkan pendapatan perkapitapenduduk pada tahun 2019sebesar31,96 juta rupiah.

GRAFIK PDRB PERKAPITA



II. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

1. Visi dan Misi

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan jangka menengah Kabupaten Tana Toraja ditetapkan Visi Pemerintah Kabupaten Tana Toraja 2016 - 2021 yaitu "**Menuju Masyarakat Tana Toraja yang Unggul dan Sejahtera**". Kemudian Visi tersebut dijabarkan ke dalam 5 butir Misi yang mencerminkan tentang segala sesuatu yang akan dilaksanakan untuk mencapai Visi tersebut. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan merupakan rumusan perencanaan yang bersifat komprehensif mengenai bagaimana cara pemerintah daerah mempunyai tujuan dan sasaran RPJMD secara optimal. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan

sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategi dan arah kebijakan juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah menciptakan nilai penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut dapat menciptakan nilai. Melalui parameter tersebut dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi yang sekaligus dapat menciptakan budaya berfikir strategis dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan keuangan pemerintahan daerah yang lebih baik transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja. Selanjutnya Strategi dan Arah Kebijakan dijabarkan kedalam 5 Strategi misi dan 5 arah kebijakan misi yang mencakup bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, percepatan reformasi birokrasi, penguatan lembaga dan kelembagaan keagamaan, kemasyarakatan, kerjasama/kemitraan terutama dipedesaan, meningkatkan penanggulangan kemiskinan dan peluang berusaha dan bekerja, pemberdayaan ekonomi yang partisipatif dan pro rakyat, Revitalisasi pertanian dan perkebunan dalam arti luas, Pengembangan potensi sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan dengan pendekatan kawasan, Percepatan pembangunan infrastruktur dan tata ruang untuk mendorong pembangunan kepariwisataan, pertumbuhan ekonomi, peluang investasi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah. Prioritas Daerah sebagai tahapan implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dijabarkan secara bertahap setiap tahun dalam wujud dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang di dalamnya memuat prioritas pembangunan.

**1. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah :
Anggaran dan Realisasi APBD Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2019**

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
I	Pendapatan Daerah	1.328.335.248.000	1.185.863.913.488,08	89,27 %
	Jumlah PAD	187.752.107.000	119.464.168.341,55	63,63 %
	Pendapatan Pajak Daerah	13.000.000.000,00	12.366.450.845,00	95,13 %
	Pendapatan Retribusi Daerah	17.000.000.000,00	12.803.771.427,00	75,32 %
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Dipisahkan	13.000.000.000,00	7.443.699.740,00,00	52,91 %
	Lain-Lain PAD Yang Sah	144.752.107.000,00	86.850.306.329,55	60 %
	Pendapatan transfer Transfer pemerintah pusat			
	Dana Perimbangan	840.282.899.000,00	812.992.474.509,00	96,75 %
	Dana Bagi Hasil Pajak/bagi hasil bukan pajak	17.026.959.000,00	13.040.143.050,00	76,59 %
	DAU	592.384.301.000, 00	592.384.301.000,00	55 %
	DAK	230.871.639.000,00	207.568.030.459,00	89,91 %
	Dana Desa	124.964.994.000,00	124.964.994.000,00	100 %
	Transfer Pemerintah Provinsi			
	Pendapatan bagi hasil pajak	59.000.000.000,00	45.980.083.503,62	77,93 %
	Pendapatan bagi hasil lainnya	30.000.000.000,0	29.077.881.700,00	96,93 %

II	Belanja Daerah	1.339.755.415.252,00	1.160.505.875.881,91	86,62 %
1.	Belanja Tidak Langsung	630.877.603.663,00	608.211.166.035,91	96,41 %
2.	Belanja Langsung	708.877.811.589,00	552.294.709.846,00	77,91 %
	Surplus/Defisit	(11.420.167.252,00)	25.358.037.606,17	(222,05)%
III	Pembiayaan Daerah			
1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	16.420.167.252,06	16.420.167.252,06	100%
	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	16.420.167.252,06	16.420.167.252,06	100%
2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100%
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah	21.420.167.252,06	21.420.167.252,06	100%

Sumber Data : DPPKAD Kab.Tana Toraja

III. URUSAN DESENTRALISASI

a. Urusan Wajib Yang Dilaksanakan

Sebagaimana telah dirumuskan dan disepakati bersama bahwasasaran dan target kinerja pembangunan dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran Pembangunan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2019. sedangkan implementasi operasionalnya tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2019. Berikut ini kami sampaikan secara garis besar capaian kinerja pada urusan wajib :

1. Urusan Pendidikan, sekitar 87,05%
2. Urusan Kesehatan, sekitar 86,73 %
3. Urusan Lingkungan Hidup, sekitar 96,99 %
4. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sekitar 68,55 %
5. Urusan Perencanaan Pembangunan, sekitar 82,32 %
6. Urusan Perumahan, sekitar 59,29 %
7. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga, sekitar 91,22 %
8. Urusan Bidang Penanaman Modal , sekitar 94,87 %
9. Urusan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, sekitar 97,62 %
10. Urusan Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil, sekitar 95,65 %
11. Urusan Bidang Ketenagakerjaan, sekitar 94,86 %
12. Urusan Ketahanan Pangan, sekitar 79,90 %
13. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sekitar 96,55 %
14. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, sekitar 87,24 %
15. Urusan Perhubungan, sekitar 99,45 %
16. Urusan Komunikasi dan Informasi, sekitar 96,33 %
17. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, sekitar 91,61 %
18. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian, sekitar 88,97 %
19. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sekitar 96,41 %

20. Urusan Sosial, sekitar 91,36 %
21. Urusan Kebudayaan, sekitar 91,70 %
22. Urusan Kearsipan dan Urusan Perpustakaan, sekitar 82,06 %

b. Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan

Secara garis besar capaian kinerja pada penyelenggaraan urusan pilihanyang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Urusan Pertanian, sekitar 75,07 %
2. Urusan Pariwisata, sekitar 95,61 %
3. Urusan Industri dan Urusan Perdagangan sekitar 94,53

C. Indikator Kinerja Kunci

1. Tataran Pengambil Kebijakan

Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah padatataran pengambil kebijakan meliputi 13 (Tiga Belas) aspek:

NO	ASPEK	No	IKK	JENIS DATA	KINERJA
1	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH	1	Keberadaan PERDA IMB	- Perda No.1 Tahun 2016 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	Ada
		2	Rasio Rumah ber IMB	- Jumlah rumah ber IMB sd. Akhir Tahun 2019, sebanyak 33,455 Unit - Jumlah seluruh rumah sd. Akhir Tahun 2019, sebanyak 46.499 Unit	71,95 %
		3	Keberadaan PERDA Ketertiban Umum	- Perda No.2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Ada
		4	Pengurusan E- KTP	- Jumlah penduduk yang sudah terekam dalam KTP-EL sebanyak 157.984 - Jumlah penduduk yang wajib ber KTP sebanyak 200.237	78,89 %
		5	Pengurusan KIA	- Jumlah anak yang sudah memiliki KIA = 245 - Jumlah Anak yang seharusnya memiliki KIA = 349	70,20 %
		6	Rasio personil Satpol PP terhadap jumlah penduduk	- Personil Satpol PP (PNS) Pada Tahun 2019, sebanyak 75 Orang - Penduduk pada akhir tahun 2019, berjumlah 286.562 Orang	0,03
		7	Keberadaan PERDA tentang Penanganan Bencana	- Perda No.	Ada
		8	Keberadaan peraturan tentang kebersihan Kabupaten	- Perda No.2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat - Perda No.8 Tahun 2011 tentang Restribusi Perizinan Tertentu	Ada 2
2	KESELARASAN DAN EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARAPEMERINTAH	9	Ketepatan waktu penyampaian LPPD berdasarkan PP Nomor 3 tahun 2010	LPPD 2018 disampaikan sesuai Surat Pengantar Nomor : . 045.2/0326/III/SETDA, Tanggal 16 Maret 2019	Tepat

NO	ASPEK	No	IKK	JENIS DATA	KINERJA
	AN DAERAH DAN PEMERINTAH, SERTA ANTAR PEMERINTAHAN DAERAH DALAM RANGKAPENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH	10	Ketepatan waktu penyampaian Laporan keuangan berdasarkan PP 8/2006	Bukti Pengiriman :Laporan Keuangan (LKPD) 2018, disampaikan pada tanggal 27 Maret 2019, sesuai Surat Pengantar LKPD Kab. Tana Toraja T.A. 2018, Nomor 045.2/0352/18/Setda	Tepat
			Ketepatan waktu penyampaian kinerja berdasarkan PP 8/2006	Laporan Kinerja 2019, disampaikan pada tanggal,28 Oktober 2019	- Tepat
		11	Pemerintah Daerah yang memiliki Peraturan tentang SPM	Ada , yang terdiri dari : 1. SPM Bidang Urusan Pendidikan 2. SPM Bidang Urusan Kesehatan 3. SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 4. SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 5. SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 6. SPM Bidang Urusan Sosial	6 SPM
		12	Kerjasama dengan daerah lain	Jumlah MOU yang masih berlaku pada tahun 2019, sebanyak 2 MOU yang terdiri dari : 1. Perjanjian Kerjasama antara Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Tana Toraja dgn Tim Terpadu Pengawasan Bahan Berbahaya Yang Disalahgunakan Dalam Pangan ttg Pengawasan dan Pengendalian Distribusi Produk Perikanan 2. Perjanjian Kerjasama antara Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Selatan dgn Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kab. Tana Toraja ttg Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan SDM Pemerintah Kab. Tana Toraja 3. Nota Kesepahaman antara Pemprov Sulsel dengan Pemkab. Tana Toraja ttg Rest Area 4. Kesepahaman antara Badan Penyuluhan & Pengembangan SDM Pertanian Kementrian Pertanian dengan Pemkab. Tana Toraja 5. Ombudsman 6. MOU dengan BPKP 7. Perjanjian Kerjasama para PLN se Sulsel	Ada, 10 MOU
3	KESELARASAN ANTARA KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH	13	Kesesuaian prioritas pembangunan	- Prioritas pembangunan daerah (RKPD) mendukung prioritas pembangunan nasional, sebanyak 10 Program - Prioritas pembangunan nasional ada sebanyak 5program prioritas	100 %
		14	Urusan wajib yang diselenggarakan daerah	Urusan Wajib yang dilaksanakan pada Tahun 2019 (APBD) = 24Urusan.	100 %
		15	Waktu penetapan PERDA APBD 2019	Perda No.4 Tahun 2019 ttg APBD T.A.2019	Tepat
		16	Keberadaan PERDA tentang pengelolaan keuangan daerah ber-dasarkan PP58/2005	Perda Nomor : 05 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2008 ttg Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	Ada

NO	ASPEK	No	IKK	JENIS DATA	KINERJA
		17	Belanja untuk pelayanan dasar	Belanja Pelayanan Dasar APBD Tahun 2019(Realisasi) 1. Urusan Pendidikan Rp.189.425.504.623,00 2. Urusan Kesehatan(Dinkes)Rp. 96.230.944.765,00 Urusan Kesehatan(RSUD) Rp . 96.840.081.529,90 3. Urusan PU & PRRp.141.414.623.196,10 4. Urusan PR & KP Rp. 31.028.482.903,00 5. Urusan Trantibum(Satpol) Rp. 8.275.287.170,00 6. Urusan Linmas (Kesbang) Rp. 3.049.615.902,00 7. Urusan Sosial Rp.3.687.472.640,00 Total Belanja Pelayanan Dasar Rp.569.952.012.729,00 Total Belanja APBD 2019 Rp.1.160.505.875.881,91	49,11 %
		18	Belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan	Belanja Pendidikan dan Kesehatan APBD Tahun 2019 1. Urusan PendidikanRp. 189.425.504.623,00 2. Urusan Kesehatan(Dinkes)Rp. 96.230.944.765,00 Urusan Kesehatan(RSUD)Rp. 96.840.081.529,90 Total Belanja Pend & KesehatanRp.193.071.026.294,90 Total Belanja APBD 2019 Rp.1.160.505.875.881,91	32,96 %
		19	Keberadaan PERDA tentang Standar Pelayanan Publik ¹ sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Ada, Perda Nomor 7 Tahun 2015 ttg Pelayanan Publik	Ada
		20	Ratio PNS terhadap penduduk	- Jumlah PNS Kabupaten Tahun 2019 = 4.518 Orang - Jumlah Penduduk Kabupaten tahun 2019 = 286.562	1,58 %
		21	Rasio PNS memiliki kualifikasi pendidikan tinggi minimal DIII (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	- Jumlah PNS Kabupaten tahun 2019 yang memiliki Kualifikasi Pendidikan Tinggi Minimal DIII (diluar Guru dan Tenaga Kesehatan) = 1.053 - Jumlah PNS Kabupaten tahun 2019. = 4.518	23,31
		22	Penataan Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah, sebagai berikut : 1. Bagian (Setda) = 09 Unit 2. Dinas = 23 Unit 3. Badan = 06 Unit 4. Kantor = 01 Unit 5. Rumah Sakit = 01 Unit 6. Lembaga Teknis Lainnya = 01Unit 7. Kecamatan = 19 Unit Jumlah Perangkat Daerah =60Unit	60Unit
4	EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN DPRD	23	PERDA yang ditetapkan	Perda yang ditetapkan dalam Tahun 2019, sebanyak 5 Perda	5
		24	Jumlah RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2019	- Raperda yang disetujui DPRD tahun 2019, sebanyak 9 Raperda - Raperda yang diusulkan tahun 2019, sebanyak 9 Raperda	100 %

NO	ASPEK	No	IKK	JENIS DATA	KINERJA
5	EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH DPRD BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN	25	Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh Pemda	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Keputusani DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD Tahun 2019, sebanyak 23 Keputusan - Jumlah Keputusan DPRD yang dihasilkan Tahun 2019, sebanyak 23 Keputusan 	100 %
6	EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH KEPALA DAERAH BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN	26	Keputusan Bupati yang ditindaklanjuti	<ul style="list-style-type: none"> - Keputusan Bupati Tahun 2019 ditindaklanjuti, sebanyak 381 Keputusan - Keputusan Bupati Tahun 2019, sebanyak 381 Keputusan 	100 %
		27	Peraturan Bupati yang ditindaklanjuti	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Bupati dalam Tahun 2019, sebanyak 29 - Peraturan Bupati Tahun 2019 ditindaklanjuti, sebanyak 29 Perbup 	100 %
7	KETAATAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA PERATURAN PER-UNDANG-UNDANGAN	28	Jumlah PERDA yang dibatalkan	<ul style="list-style-type: none"> - Perda yang dibatalkan, sebanyak 0 Perda - Perda yang dikirimkan untuk dievaluasi oleh Pemerintah sebanyak 6 Perda 	100 %
8	INTENSITAS DAN EFEKTIVITAS PROSES KONSULTASI PUBLIK ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN MASYARAKAT ATAS PENETAPAN KEBIJAKAN PUBLIK YANG STRATEGIS DAN RELEVAN UNTUK DAERAH	29	Keberadaan PERDA/PerBup tentang konsultasi publik	PERDA Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelayanan publik	Ada
		30	Adanya media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik (website Kabupaten, pos, bag/ biro humas, leaflet/ brosur)	Media informasi : Website : <ol style="list-style-type: none"> 1. www.tanatorajakab.go.id 2. Facebook (Humas dan Protokoler Setda Kab. Tana Toraja) 3. LPSE Kab. Tana Toraja 4. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 5. www.dprd-tanatorajakab.go.id 6. Torajaland.com 7. Simluhtan 8. www.cagarbudayatanatoraja.net 	Ada
9	TRANSPARANSI DALAM PEMANFAATAN ALOKASI, PENCAIRAN DAN PENYERAPAN DAU, DAK DAN BAGI HASIL	31	Dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan	<ul style="list-style-type: none"> - Dana Perimbangan yang terserap Tahun 2019 sebesar Rp.812.992.474.509,00 - Dana Perimbangan yang direncanakan sesuai APBD Tahun 2019 sebesar Rp.840.282.899.000,00 	96,75%
		32	Belanja Publik terhadap DAU	<ul style="list-style-type: none"> - Realisasi Belanja Langsung APBD Tahun 2019 Sebesar Rp.552.294.709.846,00 - Realisasi DAU Tahun 2019 sebesar Rp.592.384.301.000,00 	93,23%
		33	Belanja Langsung terhadap total APBD	<ul style="list-style-type: none"> - Total Realisasi Belanja Langsung APBD Tahun 2019 Sebesar Rp.552.294.709.846,00 - Total Realisasi Belanja APBD Tahun 2019 sebesar Rp.1.160.505.875.881,91 	47,59%

NO	ASPEK	No	IKK	JENIS DATA	KINERJA
10	INTENSITAS, EFEKTIVITAS DAN TRANSPARANSI PEMUNGUTAN SUMBER-SUMBER PAD DAN PINJAMAN / OBLIGASI DAERAH	34	Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dalam APBD (Realisasi)	- PAD APBD (Realisasi) Tahun 2019, sebesar Rp.119.464.168.341,55 - Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2019, sebesar Rp.1.185.863.913.488,08	10,07%
11	EFEKTIVITAS PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PELAKSANAAN TATA USAHA, PERTANGGUNG JAWABAN DAN PENGAWASAN APBD	35	Opini BPK terhadap LapKeu Daerah	- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2018, dengan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) - Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2019, dengan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	Opini Tahun 2018 = WDP Opini Tahun 2019 = WDP
		36	Rasio SILPA terhadap total pendapatan	- SILPA Tahun 2019, sebesar Rp.36.778.204.858,23 - Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2019, sebesar Rp. 1.185.863.913.488,08	3,10%
		37	Rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja	- Realisasi Belanja APBD Tahun 2019, sebesar Rp.1.160.505.875.881,91 - Total Anggaran Belanja dalam APBD Tahun 2019, sebesar Rp.1.339.755.415.252,06	86,62 %
		38	Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti	- Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti sampai dengan Tahun 2019, sebanyak 139 temuan - Temuan BPK RI sampai dengan akhir Tahun 2019, sebanyak 156 temuan	89,10 %
12	PENGELOLAAN POTENSI DAERAH	39	Rasio realisasi PAD 2019 terhadap <u>potensi PAD</u> *	- Realisasi PAD Tahun 2019, sebesar Rp.119.464.168.341,55 - Potensi PAD pada APBD Tahun 2019, sebesar Rp.187.752.107.000,00	63,63%
		40	Peningkatan PAD	- Total PAD pada Tahun 2019, sebesar Rp.119.464.168.341,55 - Total PAD pada Tahun 2018, sebesar Rp.106.108.442.618,94	11,18%
13	TEROBOSAN / INOVASI BARU DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	41	Penghargaan dari Pemerintah yang diterima oleh Pemda dalam tahun 2019	Penghargaan yang diterima, sebanyak 5 yang terdiri dari : 1. Tanda Penghargaan Swasti Saba Wistara dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas Keberhasilan dalam Menyelenggarakan Kabupaten/Kota Sehat untuk Klasifikasi Taraf Pengembangan 2. Piagam Penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia atas Rekor Peserta Lelang Kopi Terbanyak 3. Piagam Penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia atas Rekor Hasil Lelang Kopi dengan Jumlah Terbanyak 4. Piagam Penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia atas Rekor Minum Kopi Menggunakan Tempurung Kelapa Terbanyak 5. Piagam Penghargaan dari Gubernur Sulawesi Selatan sebagai Terbaik Dalam Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2019 Kriteria Kedalaman dan Konsistensi	5 Penghargaan

NO	ASPEK	No	IKK	JENIS DATA	KINERJA
		42	Keberadaan E-procurement	Ada, berupa 1. Penerapan E-procurement mulai operasi pada bulan Oktober Tahun 2011 2. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 06 Tahun 2012 ttg Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Tana Toraja 3. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 5 Tahun 2012 ttg Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Tana Toraja	Ada
		43	Jumlah persetujuan investasi	Persetujuan ijin investasi pada Tahun 2019	308 izin

2. Tataran Pelaksana Kebijakan

Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah padatatan pelaksana kebijakan meliputi 8 (delapan) aspek dan Indikator Kinerja Kunci sebanyak 21 (dua puluh satu) penilaian kepada 52 Organisasi Perangkat Daerah.

3. Tataran Pelaksana Kebijakan

Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tataran pelaksana kebijakan meliputi Aspek Tingkatan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan wajib dan urusan pilihan sebagai berikut :

Capaian Kinerja Pada Urusan Wajib

No.	Urusan	Indikator Kunci Kunci	Capaian Kinerja
1.	Pendidikan	Pendidikan Usia Dini (PAUD)	131,9 %
		% penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	96%
		Angka Partisipasi i Murni APM SD/MI/Paket A	105,35%
		Angka Partisipasi Murni APM SMP/MTs/Paket B	98,87%
		Angka Partisipasi Murni APM SMA/SMK/MA/Paket C	77,28 %
		Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0 %
		Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0%
		Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	0,73%
		Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100 %
		Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	99,86%
		Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	100%
		Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	102,8 %
		Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	91,60%
2.	Kesehatan	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	90,74%
		Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	70,11 %
		Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi	94,63 %

		kebidanan	
		Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan	100%
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	80,80 %
		Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100 %
		Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100%
		Cakupan Desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	97,48 %
		Cakupan kunjungan bayi	102,70%
3.	Lingkungan Hidup	Penanganan sampah	92,83%
		Pasar Tradisional Tergolong Baik	100%
		Tempat pembuangan sampah (TPS) per 1000 penduduk	12,64%
		Penegakan hukum lingkungan	0 %
4	Pekerjaan Umum	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	64,36%
		Luas Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	77,12%
		Rumah Tangga per Sanitasi	87,66 %
		Kawasan Kumuh	2,38 %
5	Tata Ruang	Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah per HPL/HGB	17,87 %
6	Perencanaan Pembangunan	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang Telah ditetapkan dengan Perda	Ada
		Tersedianya Dokumen perencanaan : RPJMD yang Telah ditetapkan dengan Perda/Perkada	Ada
		Tersedianya Dokumen perencanaan : RKPd yang Telah ditetapkan dengan Perkada	Ada
		Penjabaran program RPJMD kedalam RKPd	100 %
7	Perumahan	Rumah tangga yang menggunakan air bersih	91,99 %
		Lingkungan Permukiman Kumuh	2,38%
		Rumah layak huni	76,74%
8	Kepemudaan dan Pemuda Olahraga	Gelanggang / balai remaja (selain milik Swasta)	0,0003 %
		Lapangan olahraga	35,19%
9	Penanaman Modal	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	26,20%
10	Koperasi dan UKM	Koperasi aktif	87,64 %
		Usaha Mikro dan Kecil	97,81 %
11	Kependudukan dan Catatan Sipil	Kepemilikan KTP	88,61%
		Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	80,45%
		Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah
12	Ketenagakerjaan	Pelayanan Kepesertaan Jaminan Sosial Bagi Pekerja/ Buruh	100%

		Pencari kerja yang ditempatkan	80,45%
13	Ketahanan Pangan	Regulasi ketahanan Pangan	Ada
		Ketersediaan pangan utama per 1000 penduduk	68,51%
14	Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak	Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	81,52%
		Angka melek huruf perempuan usia 15 th keatas	100 %
		Partisipasi angkatan kerja perempuan	100 %
15	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Peserta Program KB Aktif bagi pasangan usia subur	100 %
		Rasio Petugas Lapangan KB/ Penyuluh KB di setiap Lembang/ kelurahan	100 %
16	Perhubungan	Angkutan darat	0,01%
17	Komunikasi dan Informatika	Web site milik pemerintah daerah	Ada
		Pameran / expo	4 kali
18	Pertanahan	Luas lahan bersertifikat	90,75 %
		Penyelesaian Kasus Tanah Negara	100 %
		Penyelesaian Ijin Lokasi	100 %
19	Kesbang dan politik	Kegiatan pembinaan politik daerah	1Kegiatan
		Kegiatan pembinaan terhadap LSM,Ormas Dan OKP	6 kegiatan
20	Otonomi Daerah	Sistem informasi manajemen Pemda	4 buah
		Indeks kepuasan Layanan Masyarakat	Ada
21	Pemberdayaan Masy.dan Desa	PKK aktif	100%
		Posyandu	100 %
22	Sosial	Sarana social seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	2 buah
		Persentase Penyandang Cacat Baik Fisik dan Mental, Serta Lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan	100 %
		PMKS yang memperoleh bantuan social	100 %
23	Kebudayaan	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	4kali event
		Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	17 kali
		Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	100%
24	Statistik	Penyusunan buku” kabupaten dalam angka	Ada
		Penyusunan buku “PDRB Kabupaten	Ada
		Penerapan pengelolaan arsip secara baku	100%
		Kegiatan Peningkatan SDM pengelola kearsipan	1 Kegiatan
26	Perpustakaan	Koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah	53,29 %
		Pengunjung Perpustakaan	160,35%

Capaian Kinerja Urusan Pilihan

No.	Urusan	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja
1.	Perikanan	Jumlah produksi perikanan	99,31%

		Jumlah konsumsi ikan	95,83%
2.	Pertanian	Produktivitas padi atau bahan utama local lainnya per hektar	6,12%
		Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	26,23%
3.	Kehutanan	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	26,96%
		Kerusakan kawasan hutan	1,45%
4.	Energi dan Sumber Daya Mineral	Pertambangan tanpa ijin/liar	83,02%
		Kontribusi sector pertambangan terhadap PDRB	1,56%
5.	Pariwisata	Jumlah kunjungan wisata Wisatawan	1.076.863
		Kontribusi sector pariwisata terhadap PDRB	20,68%
6.	Industri	Kontribusi sector Industri terhadap PDRB	7,36%
		Pertumbuhan Industri	85,61 %
7.	Perdagangan	Kontribusi sector perdagangan terhadap PDRB	17,87%
		Ekspor Bersih Perdagangan	Rp.9.430.335.780,-
8.	Transmigrasi	Transmigran swakarsa	0%

IV. TUGAS PEMBANTUAN

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan umum serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah yang diselenggarakan secara sinergis dengan pelaksanaan asas desentralisasi.

Tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diserahkan dari Pemerintah Kabupaten Tana Toraja kepada desa / lembang hingga saat ini belum ada, baik yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) maupun dalam bentuk Peraturan Bupati ataupun Keputusan Bupati Tana Toraja, namun demikian dikarenakan desa / lembang merupakan ujung tombak terdepan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, maka semua kegiatan yang sifatnya pelayanan masyarakat (public service) telah lama dilakukan oleh pemerintah desa / lembang, antara lain : Pembinaan dan pengembangan masyarakat di pemukiman transmigrasi, Penyusunan laporan pengelolaan kegiatan penyelenggaraan Adminduk Kab/Kota, Koordinasi dan konsultasi ke Provinsi, Koordinasi dan Konsultasi ke Jakarta, Pemberian surat izin miras, Pemberian surat Izin Gangguan, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan, dan sebagainya. Disamping kegiatan yang sifatnya pelayanan administrasi, oleh Pemerintah Kabupaten Tana Toraja di setiap desa/lembang ditunjuk seorang kolektor dalam pelaksanaan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan retribusi izin potong hewan yang biasanya dilakukan oleh salah satu Kepala Urusan dan / atau Kepala Dusun / Lingkungan dalam struktur pemerintahan lembang/desa.

E. TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

1. Kerjasama Antar Daerah

Didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan perlu dilaksanakan kerjasama daerah. Adapun bentuk kerjasama antar daerah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tana Toraja adalah Kerjasama Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dengan Pemerintah Daerah

disekitarnya, dan beberapa Provinsi yang meliputi kerjasama dalam bidang Tata Tertib DPRD, Pendapatan asli daerah (PAD), Rancangan peraturan daerah (Ranperda), Perbatasan antar daerah, dalam bidang kesehatan.

2. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga

Selain melakukan kerjasama antar daerah, Pemerintah Daerah juga melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Pada tahun 2019 kerjasama dengan pihak ketiga dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja yang meliputi :

- a. Perjanjian Kerjasama antara Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Tana Toraja dgn Tim Terpadu Pengawasan Bahan Berbahaya Yang Disalahgunakan Dalam Pangan ttg Pengawasan dan Pengendalian Distribusi Produk Perikanan
- b. Perjanjian Kerjasama antara Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Selatan dgn Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kab. Tana Toraja ttg Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan SDM Pemerintah Kab. Tana Toraja
- c. Nota Kesepahaman antara Pemprov Sulsel dengan Pemkab. Tana Toraja ttg Rest Area
- d. Kesepahaman antara Badan Penyuluhan & Pengembangan SDM Pertanian Kementerian Pertanian dengan Pemkab. Tana Toraja
- e. Ombudsman
- b. MOU dengan BPKP
- c. Perjanjian Kerjasama para PLN se Sulsel

3. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah

Penyelenggaraan koordinasi dengan instansi vertikal yang berada di Kabupaten Tana Toraja, dilakukan pada tataran koordinasi yang bersifat teknis penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam pelaksanaan urusan-urusan pemerintahan yang bersifat urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pelaksanaan koordinasi antara Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Instansi Vertikal yang berada di Kabupaten Tana Toraja mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah, yang hingga kini masih dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan di daerah dalam berbagai kegiatan koordinasi antara lain : Kementerian Agama Kabupaten Tana Toraja, Kantor Badan Pusat Statistik Daerah, Kepolisian Resort Tana Toraja, Kodim 1414 Tana Toraja, Kejaksaan Negeri Tana Toraja, Pengadilan Negeri Tana Toraja, Kantor Pertanahan Nasional Tana Toraja, kantor Perbendaharaan Negara (KPN) Tana Toraja, Badan Pengelola Daerah Aliran Sungai (BP-DAS) Sa'dang, Bandar Udara Pongtiku Rantetayo (Ditjen Perhubungan Udara), dan Kantor Pelayanan Pajak Tana Toraja. Selain itu koordinasi dalam tataran pengambilan kebijakan yang bersifat strategis dilakukan dalam forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang melibatkan unsur-unsur pimpinan di Kabupaten Tana Toraja yang dipimpin secara langsung oleh Bupati Tana Toraja.

4. Pembinaan Batas Wilayah

Kebijakan pembinaan batas wilayah masih diarahkan pada penegasan dan penetapan batas wilayah administrasi yang merupakan kelanjutan dari kebijakan pada tahun sebelumnya. Batas suatu wilayah secara universal memiliki peran strategis dalam

menentukan kebijakan pemerintah baik untuk kepentingan daerah itu sendiri maupun hubungan dengan daerah lain. Ketidak jelasan batas suatu wilayah terkadang akan menimbulkan persoalan dengan daerah lain diantaranya aspek legal, teknis dan sosial ekonomi. Pada Tahun 2019 pemerintah daerah Kabupaten Tana Toraja tidak memprogramkan kegiatan penegasan dan penetapan batas daerah, khususnya pada pelacakan dan pemasangan patok. Namun tidak berarti tidak ada kegiatan yang bersentuhan dengan batas daerah yang bersebelahan. Untuk tahun 2019 kegiatan yang dilaksanakan adalah persiapan dalam rangka penyusunan Draft Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah antara Kabupaten Pinrang, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Enrekang dengan Kabupaten Tana Toraja yang mana kegiatan tersebut adalah program dari Pemerintah Pusat melalui Ditjen Pemerintahan Umum. Melalui kegiatan tersebut oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melibatkan semua daerah yang bersangkutan untuk memberikan masukan dan saran sebagai bahan draft yang dimaksud.

5. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

Selama tahun 2019 di Kabupaten Tana Toraja terdapat beberapa kejadian yang dikategorikan **Bencana Alam** yang bersifat lokal, Selain itu beberapa kejadian memiliki potensi menjadi *bencana alam* yang harus diwaspadai adalah Bencana **Tanah Longsor, Banjir dan Angin Puting Beliung**, Dan potensi bencana alam lainnya yang juga sangat mungkin terjadi adalah bencana **Kebakaran dan Kebakaran Hutan** hal ini terjadi karena sebagian besar luas hutan yang ada didominasi oleh tanaman pinus yang sangat rentan atau mudah terbakar, khususnya pada musim kemarau dan terjadinya penyempitan aliran sungai.

6. Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Stabilitas Wilayah Kabupaten Tana Toraja sepanjang Tahun 2019 secara umum tergolong **aman**, hal itu ditunjukkan dengan tidak terjadinya permasalahan yang menonjol dan mengganggu ketentraman dan ketertiban, mengganggu stabilitas pembangunan daerah, dan lain sebagainya. Hal ini terus kita pertahankan untuk menjaga dan memelihara suasana kondusif yang dilandasi nilai – nilai kearifan.

Penutup

Demikian Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2019 sebagai implementasi azas akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat. Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Akhir Tahun Anggaran 2019 ini semoga dapat dijadikan sumber informasi tentang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran. Kami menyadari bahwa disamping keberhasilan dalam pencapaian kinerja masih terdapat kekurangan dan belum dapat

secara optimal memberikan kepuasan kepada semua pihak, terutama bagi seluruh masyarakat Kabupaten Tana Toraja. Demikian Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2019 ini dipublikasikan untuk diketahui masyarakat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita sekalian, Amin.

Tana Toraja Desember 2019

BUPATI TANA TORAJA,

NICODEMUS BIRINGKANAE